

**Pelindungan Hukum Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT.
Trans Dana Profitri dalam Perjanjian Alih Daya dengan BPJS Kesehatan
Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh**

Fahmi Akbar¹, Nailul Amany²

INTISARI

Tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian alih daya antara BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dengan PT. Trans Dana Profitri (TDP) serta pelindungan hukum bagi pekerja alih daya yang ditempatkan pada BPJS kesehatan kantor wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian secara subjektif penelitian ini bertujuan guna memperoleh semua data yang diperlukan dalam rangka menyusun penulisan hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk meneliti bagaimana pelindungan hukum pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Trans Dana Profitri dalam perjanjian alih daya dengan BPJS kesehatan kantor wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Pada penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris dengan cara mempelajari penerapan hukum yang berlaku sesuai kenyataan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberi pemaparan dan penjelasan secara rinci dan mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, pelaksanaan perjanjian alih daya antara BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh dengan PT. Trans Dana Profitri (TDP) telah berjalan dengan optimal. Muatan dari perjanjian kerjasama masih mengacu terhadap ketentuan yang lama yakni Permenaker 19 tahun 2012. Kedua, Perjanjian Kerja dan peraturan perundang-undangan telah memberikan pelindungan hukum preventif dan represif terhadap tenaga alih daya BPJS Kesehatan Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Aceh terhadap hak-hak mereka yang terdiri dari upah, waktu kerja, lembur, kompensasi, cuti, dan jaminan sosial.

Kata kunci: Alih Daya, BPJS Kesehatan, Pelindungan Hukum, Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

¹ Mahasiswa S1 Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

***Legal Protection of Workers With Fixed-Term Employment Agreement PT.
Trans Dana Profitri in Outsourcing Agreement with The Social Security
Administering Body for Health (BPJS Kesehatan) Regional Office of North
Sumatra and Aceh***

Author: Fahmi Akbar¹, Nailul Amany²

ABSTRACT

The objective of this research is to objectively understand and analyze the implementation of the outsourcing agreement between the Regional Office of the National Health Insurance Administration (BPJS Kesehatan) in North Sumatra and Aceh, and PT. Trans Dana Profitri (TDP), as well as the legal protection for the outsourced workers placed at the Regional Office of BPJS Kesehatan in North Sumatra and Aceh. Subjectively, this research aims to obtain all the necessary data to prepare a legal paper in order to obtain a Bachelor of Law degree from Gadjah Mada University. Therefore, it is interesting to investigate the legal protection for workers under fixed-term employment agreements with PT. Trans Dana Profitri in the outsourcing agreement with the Regional Office of BPJS Kesehatan in North Sumatra and Aceh.

In this research, a normative and empirical approach is used by studying the application of applicable laws according to the realities of legal events occurring in society. The types of data used are primary and secondary data. The data obtained are then analyzed using qualitative methods, which involve detailed and in-depth exposition and explanation.

Based on the research findings and discussions, two conclusions are drawn. First, the implementation of the outsourcing agreement between the Regional Office of BPJS Kesehatan in North Sumatra and Aceh and PT. Trans Dana Profitri (TDP) has been successful. The content of the cooperation agreement still refers to the previous provisions, namely Minister of Manpower Regulation 19/2012. Second, the Employment Agreement and legal regulations have provided preventive and repressive legal protection for the outsourced workers of the Regional Office of BPJS Kesehatan in North Sumatra and Aceh in terms of their rights, including wages, working hours, overtime, compensation, leave, and social security.

Keywords: *Outsourcing, Social Security Administering Body for Health (BPJS Kesehatan), Legal Protection, Workers with Fixed-Term Employment Agreement*

¹ Undergraduate Student of Civil Law Department Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer in Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Civil Law Department.